

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman ini penggunaan teknologi sistem informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah memasuki era digitalisasi. Perkembangan teknologi memiliki peranan penting dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, dapat membantu pekerjaan manusia lebih mudah.

Dengan berkembangnya teknologi sistem informasi saat ini. Hal ini ditandai dengan hadirnya teknologi canggih atau yang sering disebut dengan era revolusi 4.0 dimana hal ini menuntut sistem pemerintahan untuk mengimbangi perubahan ini dan bagaimana caranya suatu instansi pemerintahan dapat menerapkan teknologi system informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi pada instansi pemerintahan adalah satu dari berbagai upaya dalam menciptakan pemerintah yang berbasis elektronik serta dapat menambah tingkat dan mutu layanan public dengan efisien dan efektif.¹

Dengan kecanggihan teknologi sekarang pemerintah mulai menerapkannya ke beberapa bidang pemerintahan seperti bidang kehidupan, kesehatan, perekonomian, perindustrian, dan lainnya sehingga pelayanan pemerintah kepada

¹ Sitti Harlina, M. Syukri Mustafa. *Teknologi Informasi dalam Smart City di Makassar*. Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018. Maret 8-9 2018.

masyarakat dapat bekerja secara efektifitas dan efesiensi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan masyarakat bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.²

Dengan pemanfaatan teknologi ini memberikan kemudahan pemerintah dalam dalam memberikan pelayanan publik ke masyarkat dengan optimal. Akan tetapi untuk terciptanya pelayanan publik yang baik tentu didukung oleh tata kelola pemerinatahan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien dan efektif. Karena saat ini perkembangan sistem informasi dan komunikasi sangat pesat di dunia birokrasi dan perusahaan.³

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menyadarkan pemerintah tentang pentingnya peranan sistem informasi, dalam menerapkannya tentunya memerlukan rancangan baik dalam pemilihan dan mengimplementasikan teknologi dalam pemerintahan. Karena tanpa perencanaan yang baik penerapan teknologi informasi dan komunikasi komunikasi tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan hasil yang ditentukan.⁴

Sejalan dengan kebijakan perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik yaitu aktivitas ataupun serangkaian aktivitas sebagai bentuk memenuhi keperluan layanan berdasarkan pada kebijakan undang-undang

² Restu Ramadhan, Ria Arifianti, Riswanda. *IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KOTA TANGERANG MENJADI SMART CITY (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live)*. Volume 2 Nomor 4 Desember 2019 : 140-156

³Aprilia Lianjani.2018. Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City. Hlm 1

⁴ Amri. *Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Terwujudnya Makassar Sebagai "Smart City"*. Vol.5 No.2 Juli -Desember 2016

untuk seluruh masyarakat bangsa dan warga terhadap jasa, layanan, dan barang yang tersedia dari pelaksana layanan publik.⁵

Hal ini sesuai dengan inovasi pelayanan publik yang menerapkan teknologi, dimana menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan sekarang ini Indonesia telah masuk di masa *Connectivity and Internet of Think*, dan adanya batas lingkup yang dilalui dan waktu yang singkat, lalu pengelolaan pemerintah menerapkan sistem dengan basis elektronik ataupun disebut juga dengan *E-Government (Electronic Government)* yaitu suatu keniscayaan.⁶

E-government sendiri hadir di Indonesia ditunjukkan dari diterbitkannya Arahan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dimana hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan teknologi telematika guna untuk menciptakan good governance dan terwujudnya demokrasi yang diinginkan.⁷ Lalu didukung oleh keputusan dikeluarkan Arahan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai keputusan dan cara peningkatan sebagai upaya pemerintahan dalam meningkatkan layanan berbasis elektronik.

Kemajuan teknologi ini banyak menghasilkan berbagai produk yang canggih. Karena kemajuan teknologi saat ini mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik atau dikenal dengan e-government

⁵ Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁶ Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, Kusdari. *E-Goverment dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. Vol 8 (1), Juni 2019

⁷Instruksi Presiden No 6 tahun 2011 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia

dengan menciptakan aplikasi pelayanan yang nantinya dapat dikembangkan membantu pemerintahan untuk memberi pelayanan dasar bagi publik.

Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan e-government ini tersedianya smart city. Konsep *smart city* sendiri sudah mulai berkembang dan diterapkan di kota-kota Indonesia. *Smart City* merupakan implementasi konsep daerah pintar dari memanfaatkan teknologi maupun komunikasi dalam menciptakan layanan public secara efektif, selain itu konsep ini juga dapat menambah tingkat peran publik serta pemerintahan untuk menggunakan aplikasi dan data, memberi bahan dan kritik dengan mudah.⁸

Smart City sendiri juga dapat dikatakan sebagai bagian inovasi dari pemerintahan, dimana dengan adanya *Smart City* ini nantinya dapat berperan bagi pemerintahan untuk mencukupi keperluan pelayanan public dan meningkatkan kualitas layanan secara efisien. Dari teknologi canggih terkini, pemerintahan begitu semangat dalam menciptakan kota pintar, yang dapat memberikan pelayanan serta mewujudkan daerah dengan kenyamanan hidup bagi seluruh warga.⁹

Sistem pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government dengan memanfaatkan teknologi sudah mulai di kembangkan di Indonesia. Hal ini sesuai pada kegiatan rencana gerakan mencapai 100 smart city, gerakan ini sendiri melibatkan beberapa Lembaga yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Bappena dan Kantor staff

⁸ Lely P.D. Tampubolon. Pernerangan *E-governance* Indonesia (PEGI) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi DKI Jakarta. VOL. 8, NO. 2, Oktober 2016

⁹ Winda Oktaviani, Joko Tri Nugraha. Inovasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program *Smart City*. Di Kota Magelang (Studi Kasus BAPPEDA Kota Magelang). Vol 02 No. 01, Mei 2018

Kepresidenan. Gerakan ini diadakan untuk membimbing Kabupaten atau Kota dalam menyusun Masterplan Smart City dalam memanfaatkan teknologi dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengakselerasikan potensi-potensi yang ada di masing daerah.¹⁰

Penerapan *Smart City* yang di pemerintahan daerah saat ini masih mengalami beberapa kendala yaitu tidak terciptanya sistem yang bertintegritas satu sama lain. Mengenai hal ini terbitnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan dengan basis Elektronik (SPBE). Dari kebijakan tersebut pemerintah mencoba menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik, terbuka, bersih, dan fleksibel serta melayani masyarakat yang bermutu dan dipercaya. Implementasi SPBE tersebut mengikutsertakan beberapa pihak pemerintahan melalui berbagai kementerian serta lembaga pemerintahan. Sehingga daerah yang diwajibkan dalam mulai menggunakan konsep kota cerdas di setiap daerah.

Menurut Bambang DwiAnggono, selaku Direktur Layanan Aptika Pemerintahan (LAIP) mengatakan bahwa dengan terbitnya Perpres No 95 Tahun 2018 adalah perkembangan era e-government ke era i-government (integrated government) yaitu implementasi smart government denfnan sistem yang berintegritas satu sama lain hingga menghasilkan data yang mampu mendorong tahapan sistem. Hasil data mampu digunakan sebagai acuan dalam mengambil

¹⁰https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media.

Diakses pada tanggal 1 April 2020

keputusan untuk pembuatan rencana serta penyelesaian permasalahan yang ada di suatu wilayah.¹¹

SPBE disebut juga dengan Sistem Pemerintah dengan Basis Elektronik, dimana sistem ini merupakan pelaksanaan pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberi pelayanan pada pemakai SPBE tersebut, sesuai dengan kebijakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan dengan basis elektronik. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan pemerintah secara bersih, terbuka, tepat, fleksibel dan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.¹²

Dengan kemajuan era teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan peluang kepada pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah yang nantinya dapat memudahkan layanan ke instansi pemerintah, masyarakat dan lainnya. Karena penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dapat mewujudkan pemerintah yang transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Di Indonesia sendiri di beberapa kota besar sudah mulai menerapkan smart city seperti di Surabaya dan Semarang yang lebih dulu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Smart City* yang diterapkan di Kota Surabaya sendiri mendapatkan predikat *Smart City Awards* pada 2011 yaitu *Smart Living*, *Smart Environment*, dan *Smart Governance*, dengan nilai indeks SPBE 3,72 dengan prediket sangat baik.¹³ Sedangkan di kota Semarang

¹¹ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/penerapan-spbe-transformasi-dari-egovernment-menuju-i-government/>. Di akses pada tanggal 2 April 2020. Pukul 00.30

¹² <http://spbe.go.id/>. Di akses pada tanggal 2 April 2020. Pukul 1.16

¹³ <https://surabaya.liputan6.com/read/4093424/6-terobosan-surabaya-jadi-smart-city>. Di akses pada tanggal 2 Juni 2020. Pukul 14.16

sendiri menerapkan konsep *Smart City Call Center* dan sistem Laporan yang nantinya dapat mempermudah pelaporan kondisi di lapangan untuk segera ditindak lanjuti, kemudian pemanfaatan *situation room* untuk ruang control dan monitor terpadu dengan memanfaatkan big data untuk pendataan masyarakat miskin agar dapat ditangani secara tepat sasaran, dengan indeks SPBE 3.3 dengan prediket baik.¹⁴

Di Sumatera Barat sendiri sudah mulai memanfaatkan teknologi dengan penerapan *Smart City* di beberapa daerah, seperti Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Solok. *Smart City* di Kota Padang sendiri menerapkan program aplikasi Elektronik Perizinan yang bernama Saporancak dengan tujuan mempermudah proses layanan perizinan yang ada di Kota. Beberapa perizinan yang dilayani oleh Saporancak antara lain yaitu Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (IG), Izin Apotik (IA), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Aplikasi perizinan ini adalah salah satu program dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam upaya mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.¹⁵ Di Padang Panjang sendiri menerapkan *Smart City* seperti PSC-119 yakni layanan bantuan darurat pada warga yang sakit di rumah/lapangan oleh DKK sebagai koordinator, bantuan dokter warga juga oleh DKK, dan layanan administrasi kependudukan online (Paduko) oleh Dinas Dukcapil.¹⁶ Di Pariaman sendiri Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman mengembangkan beberapa aplikasi *Smart City*

¹⁴ <https://semarang.kompas.com/read/2019/10/09/19184861/wali-kota-hendi-dengan-smart-city-semarang-sukses-hadapi-2-tantangan-besar> . Diakses pada tanggal 2 Juni 2020. Pukul 14.20

¹⁵ <https://infokomputer.grid.id/read/12946888/smart-city-kota-padang-tetap-berinovasi-walau-banyak-tantangan?page=all> Diakses Pada Tanggal 2 April Pukul 10.00

¹⁶ <http://www.portalberitaeditor.com/kota-padang-panjang-di-usia-229-tahun-terus-berkembang-jadi-smart-city-di-tanah-air/> Diakses Pada Tanggal 2 April Pukul 10:20

antara lain yaitu e-protokol untuk mengelola agenda pimpinan daerah, e-absensi untuk melihat tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN, e-BPKB untuk mengelola kendaraan dinas serta e-SPPD untuk mengelola perjalanan dinas ASN. ¹⁷Sedangkan Solok sendiri menerapkan program *Smart City* Quick Win dari unggulan program smart city yaitu Aplikasi PAK ALIPULAR untuk pelayanan dukcapil, SAIYO RSUD Arosuka, SIKDA generic untuk pelayanan di Puskesmas, dan SIPAR Arosuka untuk pelayanan perizinan, program ini merupakan upaya pemerintahan solok dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

Kabupaten Pesisir Selatan sendiri merupakan salah satu kabupaten yang sedang mempersiapkan Langkah menuju *Smart City*. Pesisir Selatan merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang mengalami perubahan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari Kabupaten yang baru keluar dari daftar Daerah tertinggal pada tahun 2014 namun Kabupaten Pesisir Selatan telah banyak menorehkan prestasi baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan semakin inovatifnya pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memanfaatkan teknologi.

Pertumbuhan dan prestasi yang telah dicapai oleh kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari keseriusan seluruh komponen daerah untuk memajukan daerah dalam memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan terwujudnya kota cerdas atau *Smart City*. Dalam mewujudkan sebuah *Smart City* terdapat 6 komponen yang harus terpenuhi, yaitu *Smart Governnance*, *Smart*

¹⁷<https://pariamankota.go.id/berita/wujudkan-pariaman-smart-city-diskominfo-kota-pariaman-gelar-fgd-pengembangan-e-government> Diakses Pada Tanggal 2 April Pukul 11.00

Dalam penelitian ini peneliti memberikan fokus kepada salah satu indikator smart city yaitu smart governance. Smart Governance secara keseluruhan adalah smart governance yang berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan yang efektif serta terus berupaya meningkatkan standar kinerja birokrasi melalui kemajuan teknologi.

Sebagai Langkah awal menuju *Smart Governance* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dimulai pada tanggal 21 Mei 2018, sebagai realisasi dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 54 Tahun 2018 Tentang Smart Nagari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor kunci untuk menjadikan sebuah daerah menjadi daerah yang cerdas (*Smart City*), Smart Nagari merupakan cara untuk meningkatkan pelayanan pemerintah nagari di bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kebudayaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, agar memberikan efek dan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang telah melakukan launching program Smart Nagari yang dilangsungkan di Kecamatan Lunang.

Gambar 1.1 Launching Program Smart Nagari

¹⁸ Dokumen Proposal *Smart City* Kabupaten Pesisir Selatan



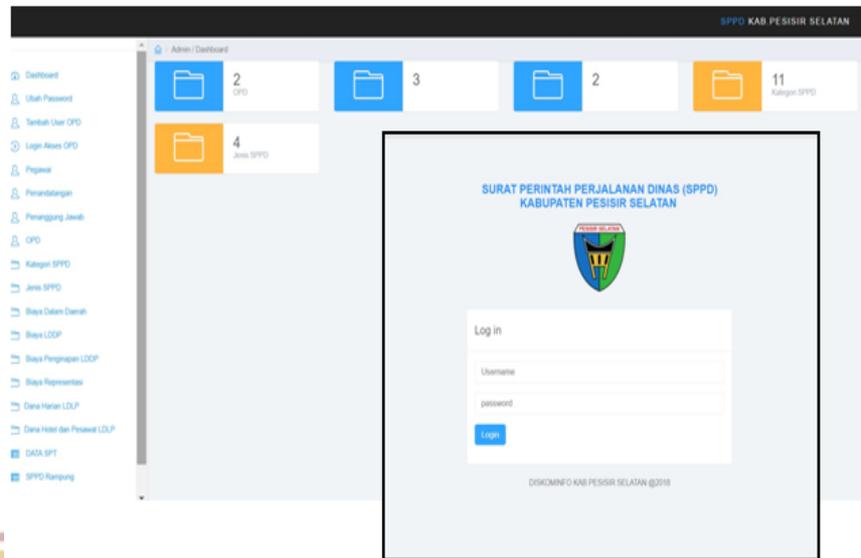
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan

Pelaksanaan Smart Nagari fokus untuk memanfaatkan TIK secara optimal dalam penyelenggaraan e-Government dan pelayanan publik sampai nagari/desa. Sehingga, Kecamatan Lunang beserta 10 nagari yang ada telah difasilitasi dengan infrastruktur yang terkoneksi dengan jaringan *Smart City* Kabupaten Pesisir Selatan. Aplikasi-aplikasi terkait e-Government dan Pelayanan Publik telah digunakan secara efektif sehingga berhasil meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif.

Selanjutnya langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menuju smart Governance yaitu telah merancang dan mengembangkan aplikasi aplikasi penunjang e-Government seperti :

Pembuatan Aplikasi baru :

- Aplikasi manajemen perjalanan dinas online.



- Pembuatan ulang Website Pemerintah daerah yang lebih responsive dan informative (<http://berita.pesisirselatankab.go.id/>)



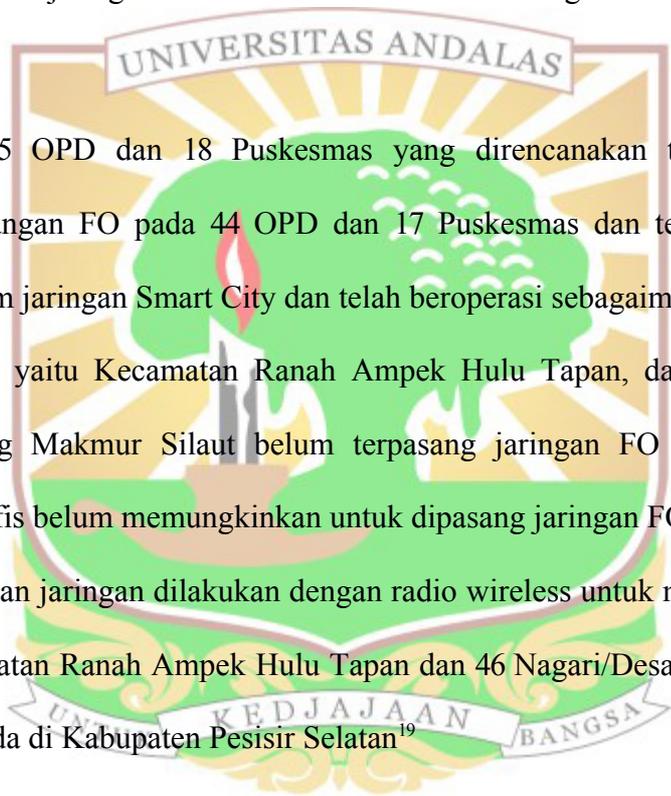
Sumber: Proposal Smart City Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk pengembangan Smart Governance di Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa upaya diantaranya adalah tersedianya infrastruktur yang handal dan siap mengakomodir perkembangan

teknologi informasi yang sangat masif dan cepat. Sampai dengan tahun 2019 sudah dilaksanakan pengembangan Infrastruktur *Smart City* untuk penunjang smart governance di Kabupaten Pesisir Selatan dengan kerjasama dengan PT. Telkom untuk penyediaan akses jaringan kabel Fiber Optic (FO) yang menghubungkan seluruh OPD lingkup Kabupaten Pesisir Selatan termasuk Kecamatan dan Puskesmas.

Pembangunan jaringan FO ini telah terlaksana dengan hasil-hasil sebagai berikut :

- Dari 45 OPD dan 18 Puskesmas yang direncanakan telah dilakukan pemasangan FO pada 44 OPD dan 17 Puskesmas dan telah terintegrasi kedalam jaringan Smart City dan telah beroperasi sebagaimana mestinya.
- 1 OPD yaitu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dan 1 Puskesmas Tanjung Makmur Silaut belum terpasang jaringan FO karena kondisi geografis belum memungkinkan untuk dipasang jaringan FO.
- Perluasan jaringan dilakukan dengan radio wireless untuk menghubungkan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan 46 Nagari/Desa dari 182 nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan¹⁹



Tabel 1.1

Tabel realisasi integrasi jaringan Smart City

No	Uraian	Status Koneksi	Keterangan
1	44 OPD	Menggunakan Fiber Optic	
2.	17 Puskesmas	Menggunakan Fiber Optic	
3	1 OPD	Menggunakan Radio	Kecamatan Ranah Ampek Hulu

¹⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan

		Wireless	Tapan
4	46 Nagari/Desa	Menggunakan Wireless	Radio Tersebar di 5 Kecamatan

Sumber: Master Plan Smart City Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya untuk pengembangan *Smart Governance* dimana Diskominfo sebagai leading sector melakukan penataan pemanfaatan teknologi informasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Penataan pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan *Smart City* sebagai penunjang TIK ini meliputi:

- Pembuatan rencana induk (Master Plan) pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Pesisir Selatan
- Perekrutan tenaga konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kemandirian dalam penyelenggaraan layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK)
- Pembuatan dan pengembangan aplikasi *e-Government*

Setelah mengintegrasikan seluruh OPD dalam jaringan *Smart City* dan Implementasi *e-Government* pada seluruh OPD, dan 46 Desa/Nagari Langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya adalah melanjutkan integrasi keseluruhan ketingkat desa pada Tahun 2020 selesai. Hal ini dilakukan agar smart governance dapat terwujud sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara luas dan menyeluruh.

Karena sebagai penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintahan desa harus diperkuat, difasilitasi, dan diawasi secara lebih ketat agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Akan tetapi dalam pelaksanaan *Smart Governance* sendiri Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan mempunyai 24 aplikasi yang membantu pemerintahan, melalui aplikasi itu baik masyarakat atau pegawai yang mengakses layanan dan informasi bisa langsung mengaksesnya di handphone atau di perangkat komputer masing-masing.

Beberapa aplikasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diantaranya Celok, Siskeudes Online, Simardi Sicantik, Planning-e, Keuangan-e, Perizinan-e, SIPKD, SIPKD Asset, Sirup, Sismiop, TV-Pessel dan sejumlah aplikasi yang berlaku secara nasional seperti KTP-e dan LPSE Simpeg-e, Sakip-e, Formasi-e, PAD-e, e-Puskesmas serta PPID-e.²⁰

Keseriusan penyelenggaraan *Smart Governance* dibuktikan dengan dukungan penuh terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilihat terjadi peningkatan signifikan pada anggaran belanja langsung dinaskominfo seperti berikut

Tabel 1.2

²⁰<https://sumbar.antaranews.com/berita/218347/ada-24-aplikasi-pelayanan-di-pesisir-selatan>. diakses pada tanggal 22 January 2020

Pertumbuhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo Pessel

Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah	Peningkatan dari tahun sebelumnya
1	2017	Rp. 5.572.210.843,-	
2	2018	Rp. 5.956.891.570,-	6,90 %
3	2019	Rp. 12.124.999.998,-	103.55 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari, dimana pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi merupakan salah satu modal awal untuk menuju *Smart Governance*. Akan tetapi transformasi menuju tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik tentu tidaklah mudah, karena memerlukan strategi yang matang serta tahapan yang perlu dilakukan seperti SDM yang memadai, infrastruktur teknologi yang memadai dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Data dan Informasi merupakan salah satu unsur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *Smart Governance*, oleh sebab itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan sebuah strategi pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang dengan baik. Dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal tentu memerlukan koordinasi lintas SKPD karena teknologi informasi ini nanti diharapkan dapat mendukung dan membantu tugas-tugas pokok pemerintah Kota, dimana suatu SKPD bisa bertugas melayani masyarakat ataupun melayani sesama SKPD. Karena itulah dalam perencanaan strategi teknologi informasi (TI) juga membutuhkan keterlibatan SKPD-SKPD lain.²¹

²¹Jurnal Sitti Harlina, M. Syukri Mustafa.2018. *Teknologi Informasi dalam Smart City di Makassar*. STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, 8 – 9 Maret 2018

Dalam pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan sebagai nilai indeks SPBE terbaik di Sumatera Barat tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai indeks SPBE 3.34, melebihi perolehan indeks SPBE Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota lainnya se-Sumbar. Hal ini merupakan modal awal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan smart Governance

Keseriusan Dinas Komunikaasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam memanfaatkan pengembangan teknologi saat ini secara maksimal dalam rangka mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, hal itu menarik perusahaan Telkom untuk bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengembangkan teknologi guna menuju *Smart Governance* yang ada di Kota Pesisir Selatan.

Dari 52 pemerintah Kabupaten dan Kota, Kabupaten pesisir Selatan salah satu Kabupaten yang menerima penghargaan penerapan implementasi smart city Nusantara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan e-Governmet yang baik. Penghargaan ISCN ini, merupakan piagam dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Dinilai berdasarkan kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan dalam menerapkan e-Government untuk merealisasikan tata kelola pemerintah dengan basis IT.²²

²²<https://jurnalsumbar.com/2017/11/sukses-manfaatkan-teknologi-ict-pemkab-pesisir-selatan-dianugerahi-penghargaan-smart-city-nusantara/>. .diakses pada tanggal 22 January 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang Dinas Kominfo yaitu Bapak Syafrudin mengatakan Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Pesisir Selatan sendiri lebih mengembangkan kepada jaringan. Sehingga aplikasi yang dikembangkan hanya bisa di akses oleh pegawai pemerintahan. Hal itu dikemukakan oleh Bapak Syafrudin salah satu sttaf dinas kominfo Pesisir Selatan

“ *Smart City* yang dikembangkan saat ini di Pesisir Selatan masih berfokus pada jaringan, Karena jaringan merupakan salah satu aspek penting dalam memulai *Smart City* atau *Smart Governance*. Hal ini dapat dilihat dimana seluruh kecamatan yang ada di Pesisir Selatan sudah tersambung semua ke Dinas Kominfo dengan kabel fiber optic untuk mengakses aplikasi *Smart City* Pesisir Selatan yang sudah dilakukan pemerintah dari tahun 2017.(wawancara dilakukan oleh Bapak Syafrudin pada tanggal 12 Maret 2020)

Setelah peneliti melakukan wawancara awal, peneliti menemukan beberapa temuan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan Smart Governance diantaranya sebagai berikut.

Pertama, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dimana dalam mewujudkan Smart City memerlukan sumber daya yang memadai. Karena suatu sistem dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan SDM yang handal, namun pada saat ini kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan masih kekurangan SDM yang berlatar belakang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).Selanjutnya Kondisi Geografis di Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup menyulitkan untuk pemerataan akses internet kesemua wilayah. Untuk mengembangkan e-Government sampai ketingkat nagari, diperlukan pembangunan tower pemancar untuk beberapa nagari yang tidak terjangkau oleh

jaringan internet. Sedangkan pemasangan tower ini membutuhkan biaya yang cukup besar.

Namun dalam mewujudkan *Smart Governance* ini Dinas komunikasi dan Informatika mengalami hambatan atau kendala, seperti kurangnya dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia yang berlatar belakang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk Menyusun penelitian untuk melihat “Bagaimana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkann di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah mendeskripsikan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berhubungan pada peran tertentu atas pelaksanaan riset pada peningkatan teori serta wawasan dan bidang akademis. Sementara itu

manfaat praktis dalam penelitian ini berhubungan pada peran praktis yang diberi oleh riset pada objek riset secara perindividu, berkelompok, dan lainnya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dengan mendeskripsikan tentang Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan secara detail Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance.

b. Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance.

c. Bagi Akademik



Dapat digunakan untuk tambahan referensi terkait Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka menuju Smart Governance.

